



PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP UTANG LUAR NEGERI DI INDONESIA

Yunita Handayani^{*1}, Muhammad Syafri²

^{1,2}Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar,
Jalan Raya Pendidikan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos 90222

*Penulis Korespondensi: yunitahndyn16@gmail.com

Abstract. *This paper examines Indonesian foreign debt and fiscal policies. Government spending represents fiscal policy in this study, whereas foreign debt is calculated as a percentage of GDP. Secondary World Bank time series data spanning 2010–2024 was used. IBM SPSS Statistics is used for simple linear regression analysis. The positive association between government spending and foreign debt is not statistically significant. The t-test significance value of 0.191 exceeds 0.05. The F test likewise shows that the regression model is negligible with a significance value of 0.191. The R² score of 0.128 suggests the model's capacity to explain foreign debt changes is still limited. This suggests that fiscal policy through government expenditure does not drive Indonesian foreign debt. To obtain more complete results, more relevant factors must be added to the investigation.*

Keywords: *Fiscal Policy, Government Expenditure, External Debt*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji utang luar negeri dan kebijakan fiskal Indonesia. Belanja pemerintah mewakili kebijakan fiskal dalam penelitian ini, sedangkan utang luar negeri dihitung sebagai persentase dari PDB. Data deret waktu sekunder Bank Dunia yang mencakup periode 2010–2024 digunakan. IBM SPSS Statistics digunakan untuk analisis regresi linier sederhana. Asosiasi positif antara belanja pemerintah dan utang luar negeri tidak signifikan secara statistik. Nilai signifikansi uji-t sebesar 0,191 melebihi 0,05. Uji F juga menunjukkan bahwa model regresi tersebut dapat diabaikan dengan nilai signifikansi 0,191. Skor R² sebesar 0,128 menunjukkan bahwa kemampuan model untuk menjelaskan perubahan utang luar negeri masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah tidak mendorong utang luar negeri Indonesia. Untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap, faktor-faktor yang lebih relevan harus ditambahkan ke dalam penelitian.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal, Belanja Pemerintah, Utang Luar Negeri,.

1. LATAR BELAKANG

Utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan yang umum digunakan oleh negara berkeimbangan dalam mendukung pembangunan ekonomi. Keterbatasan sumber daya domestik, khususnya rendahnya tingkat tabungan dan investasi, menyebabkan negara berkeimbangan mengalami keinefektifan antara kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pembiayaan internal. Dalam kondisi tersebut, utang luar negeri dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan keefektifan pembiayaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kuisuimasari, 2020).

Namun demikian, penggunaan utang luar negeri tidak terlepas dari berbagai risiko. Peningkatan utang yang tidak diimbangi dengan kapasitas pembayaran dapat menimbulkan tekanan terhadap stabilitas ekonomi serta meningkatkan beban fiskal

di masa depan. Bahkan, ketergantungan terhadap utang luar negeri berpotensi menjadi kebrentanan ekonomi, terutama ketika terjadi gejolak global dan penurunan kemampuan pembayaran negara (Citaningati & Kamaluddin, 2022). Dalam jangka panjang, akumulasi utang yang berlebihan juga dapat memicu fenomena debt overhang, yaitu kondisi di mana beban utang justru menghambat pertumbuhan ekonomi (Zeibua, 2026).

Selain itu, dinamika utang luar negeri tidak dapat dipisahkan dari kondisi makroekonomi serta kapasitas fiskal suatu negara. Negara dengan keterbatasan penerimaan domestik cenderung lebih bergantung pada pembiayaan eksternal untuk menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dan ketersediaan dana dalam negeri. World Bank (2023) menegaskan bahwa utang luar negeri menjadi salah satu sumber pembiayaan penting bagi negara berkembang, terutama ketika kemampuan mobilisasi sumber daya domestik masih terbatas. Dengan demikian, tingkat ketergantungan terhadap utang sangat dipengaruhi oleh kekuatan fiskal dan kondisi ekonomi suatu negara.

Dalam praktiknya, keterkaitan antara utang luar negeri dan kebijakan fiskal menjadi semakin jelas. Ketika penerimaan negara tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran, pemerintah cenderung menerapkan kebijakan defisit anggaran yang kemudian dibiayai melalui utang, termasuk utang luar negeri. Hal ini sejalan dengan pendapat Utama & Chalid (2024) yang menyatakan bahwa defisit fiskal terjadi akibat ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga mendorong peningkatan utang sebagai sumber pembiayaan.

Lebih lanjut, kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan belanja pemerintah dapat merangsang aktivitas ekonomi, namun apabila tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara, maka akan memperbesar defisit anggaran dan meningkatkan kebutuhan pembiayaan melalui utang. Penelitian Kuisuima et al., (2025) menunjukkan bahwa peningkatan utang seringkali merupakan konsekuensi dari kebijakan fiskal ekspansif, terutama dalam kondisi krisis ekonomi.

Namun, studi empiris menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, pendapatan pajak, inflasi, dan defisit anggaran semuanya memengaruhi utang luar negeri.

Bado et al., (2024) meyakini bahwa defisit anggaran dan pendapatan pajak melemahkan utang luar negeri, oleh karena itu dinamika utang tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu variabel. Utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang kompleks dan non-linear, sebagaimana ditunjukkan oleh Triatmanto et al., (2023) bahwa utang dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung pada pengelolaannya.

Data ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dan utang luar negeri terus memiliki pengaruh yang beragam. Studi menunjukkan pengaruh yang kuat atau hasil yang tidak konsisten. Penelitian lebih lanjut diperlukan, terutama di Indonesia, dengan menggunakan variabel kebijakan fiskal yang lebih tepat. Oleh karena itu, studi ini meneliti bagaimana kebijakan fiskal, yang diwakili oleh pengeluaran pemerintah, melemahkan utang luar negeri Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

1. *Public Finance Theory*

Public Finance Theory menjelaskan peran pemerintah dalam perekonomian melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai efisiensi ekonomi, stabilitas, serta distribusi kesejahteraan. Dalam perspektif ini, kebijakan fiskal menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan pendapatan, dan menjaga stabilitas perekonomian.

Aktivitas pemerintah dalam perekonomian meliputi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi menyediakan barang publik, fungsi distribusi mendistribusikan manfaat sosial, dan fungsi stabilisasi menjaga keseimbangan makroekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas ekonomi melalui pengelolaan pendapatan dan belanja negara (Sari et al., 2024).

Dalam implementasinya, kebijakan fiskal seringkali dihadapkan pada keterbatasan penerimaan negara dalam membiayai pengeluaran. Kondisi ini menyebabkan terjadinya defisit anggaran yang harus ditutup melalui pembiayaan, salah satunya melalui utang. Dalam kerangka ini, utang termasuk utang luar negeri

menjadi instrumen fiskal yang digunakan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, terutama di negara berkembang yang memiliki keterbatasan sumber daya domestik.

Namun demikian, keberlanjutan kebijakan fiskal menjadi aspek krusial dalam pengelolaan utang negara. Kebijakan fiskal yang tidak terkendali, khususnya dalam bentuk peningkatan belanja tanpa diimbangi oleh penerimaan yang memadai, dapat menyebabkan defisit anggaran yang berkelanjutan dan meningkatkan risiko utang. *International Monetary Fund (IMF) (2022)* menegaskan bahwa pengelolaan fiskal yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan tekanan terhadap stabilitas makroekonomi dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, penggunaan utang perlu dikelola secara optimal. Utang yang digunakan untuk pembiayaan produktif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan penggunaan yang tidak efisien justru akan menimbulkan beban fiskal di masa depan. Dengan demikian, *Public Finance Theory* menekankan pentingnya keseimbangan antara belanja pemerintah dan sumber pembiayaan guna menjaga keberlanjutan fiskal serta stabilitas ekonomi

2. *State Capacity Theory*

State Capacity Theory menjelaskan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya, menjalankan kebijakan, serta mengumpulkan penerimaan secara efektif. Kapasitas negara mencakup kemampuan administratif, fiskal, dan institusional dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan ekonomi.

Dalam konteks fiskal, kapasitas negara sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengumpulkan pajak (*tax capacity*) dan mengelola anggaran secara efisien. Negara dengan kapasitas fiskal yang rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam membiayai pembangunan dari sumber domestik, sehingga lebih bergantung pada utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan alternatif.

Fenomena ini terlihat pada banyak negara berkembang yang mengalami keterbatasan penerimaan negara akibat rendahnya rasio pajak. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan pembiayaan (*financing gap*), sehingga

pemerintah menggunakan utang luar negeri sebagai solusi untuk mendukung pembangunan (Zebua, 2026).

Lebih lanjut, *State Capacity Theory* juga menjelaskan bahwa Ketergantungan utang luar negeri bergantung pada tuntutan keuangan dan pengelolaan anggaran lembaga negara. Negara dengan kapasitas yang lemah cenderung mengalami masalah seperti inefisiensi anggaran, rendahnya kepatuhan pajak, serta tingginya ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal.

Sebaliknya, negara dengan kapasitas yang kuat mampu mengurangi ketergantungan terhadap utang melalui peningkatan penerimaan domestik dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Oleh karena itu, kapasitas negara menjadi faktor kunci dalam menentukan keberlanjutan utang dan stabilitas fiskal dalam jangka panjang.

3. Hubungan Teori dengan Penelitian

Berdasarkan *Public Finance Theory*, kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah merupakan instrumen utama dalam mendorong pembangunan ekonomi, namun juga berpotensi meningkatkan utang ketika terjadi defisit anggaran. Sementara itu, *State Capacity Theory* menjelaskan bahwa kemampuan negara dalam mengelola fiskal akan menentukan sejauh mana ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Dengan demikian, hubungan antara kebijakan fiskal dan utang luar negeri tidak hanya bersifat mekanis (belanja → defisit → utang), tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas negara dalam mengelola sumber daya dan pembiayaan.

Pengeluaran pemerintah digunakan sebagai indikator kebijakan fiskal sebagai penentu utang luar negeri, dengan mempertimbangkan bahwa peningkatan belanja tanpa dukungan kapasitas fiskal yang memadai dapat meningkatkan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

3. METODE PENELITIAN

Bank Dunia menyediakan data deret waktu dari tahun 2010–2024 untuk penelitian ini. Studi deskriptif kuantitatif ini menggunakan IBM SPSS Statistics untuk mengilustrasikan bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi utang luar negeri Indonesia.

Dengan satu variabel independen, penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier sederhana. Variabel dependen penelitian ini adalah utang luar negeri dan variabel independen adalah kebijakan fiskal, yang diwakili oleh pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, model regresi penelitian ini adalah:

$$ULN = \beta_0 + \beta_1 \text{Belanja} + e$$

ULN : Utang Luar Negeri

β_0 : Konstanta

β_1 : Koefisien Regresi

Belanja : Variabel Independen

E : Error Term

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik memverifikasi bahwa model regresi memenuhi persyaratan statistik untuk estimasi yang akurat. Uji ini memeriksa bias distribusi, hubungan variabel independen, dan varians kesalahan yang tidak proporsional dalam model. Memenuhi asumsi klasik memungkinkan model regresi untuk memberikan estimasi yang tidak bias, konsisten, dan akurat.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas menentukan apakah nilai residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Distribusi residual normal diperlukan untuk mengevaluasi temuan estimasi regresi, oleh karena itu uji ini sangat penting. Studi ini menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika $p > 0,05$, data residual terdistribusi secara teratur.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		15
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,03192296
Most Extreme Differences	Absolute	,210
	Positive	,128
	Negative	-,210
Test Statistic		,210
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,074

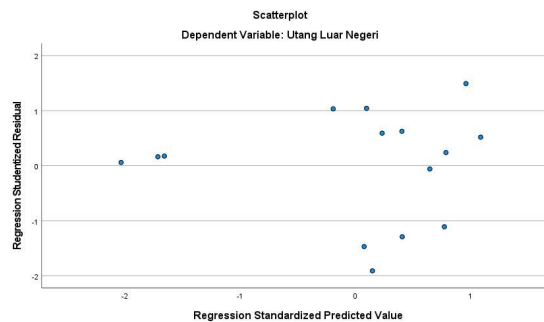
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		,070
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,063
		Upper Bound	,076

Sumber : Data diolah, SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,074. Hasil ini berada di atas tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), yang menunjukkan distribusi data residual yang teratur dalam model regresi.

2) Uji Heterokedastisitas

Dalam model regresi, uji heteroskedastisitas menentukan apakah varians residual tidak sama untuk setiap observasi. Model yang baik memiliki varians residual konstan (homoskedastisitas). Grafik scatterplot dari nilai harapan dan residual dapat digunakan untuk menguji hal ini. Model tidak memiliki heteroskedastisitas jika titik-titiknya terdistribusi secara acak dan tidak membentuk pola.



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas (*Scatter Plot*)

Sumber : Data diolah, SPSS

Grafik scatterplot tidak menunjukkan pola yang khas dalam hubungan antara nilai prediksi (ZPRED) dan residual (SRESID), dengan titik-titik yang tersebar secara acak di sekitar garis nol, baik di atas maupun di bawahnya. Tidak terlihat garis yang menyempit, melebar, atau bergelombang pada grafik.

Dengan asumsi ini, model regresi tidak memiliki heteroskedastisitas. Ini menunjukkan homoskedastisitas (varians residual konstan).

3) Uji F

Uji F menentukan apakah faktor independen memengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Nilai signifikansi tabel ANOVA digunakan untuk pengujian ini. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, model regresi tersebut valid dan variabel independen memengaruhi variabel dependen.

Tabel 2. Hasil Uji F

Anova^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33,316	1	33,316	1,903	,191b
	Residual	227,590	13	17,507		
	Total	260,906	14			

a Dependent Variable: Utang Luar Negeri

b Predictors: (Constant), Belanja Pemerintah

Sumber : Data diolah, SPSS

Nilai F yang dihitung adalah 1,903 dengan tingkat signifikansi 0,191 menurut hasil uji F (ANOVA). Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan model regresi tidak signifikan karena nilai signifikansi ini lebih tinggi dari tingkat signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$).

Ini berarti bahwa pengeluaran pemerintah, yang merupakan proksi kebijakan fiskal, tidak secara signifikan mempengaruhi utang luar negeri Indonesia selama periode penelitian. Dengan kata lain, model yang digunakan tidak menemukan bahwa perubahan pengeluaran pemerintah dapat menjelaskan perbedaan utang luar negeri secara memadai.

Karena persyaratan ini, ada kemungkinan bahwa kondisi makroekonomi, kebijakan moneter, dan faktor eksternal global memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap utang luar negeri daripada yang ditunjukkan oleh model penelitian. Akibatnya, masih ada celah dalam penjelasan yang diberikan oleh model regresi dalam hal hubungan antar variabel.

4) Uji Parsial (Uji T)

Untuk mengetahui bagaimana masing-masing variabel independen memengaruhi variabel dependen secara terpisah, digunakan uji t. Nilai signifikansi dibandingkan dengan tingkat kesalahan ($\alpha = 0,05$) untuk melakukan pengujian ini. Variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel dependen jika nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model		Coefficients^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
B	Std. Error	Beta	t	Sig.		
1	(Constant)	13,313	13,650		,975	,347
	Belanja Pemerintah	2,097	1,520	,357	1,380	,191

a Dependent Variable: Utang Luar Negeri

Sumber : Data diolah, SPSS

Pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai proksi untuk kebijakan fiskal, dan temuan uji-t menunjukkan bahwa variabel ini memiliki koefisien 2,097 pada tingkat signifikansi 0,191.

Pengeluaran pemerintah tidak memiliki dampak signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia, karena nilai signifikansinya lebih tinggi daripada tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$).

Namun, koefisien regresi positif menunjukkan bahwa, secara umum, peningkatan pengeluaran pemerintah disertai dengan peningkatan utang luar negeri. Meskipun demikian, kekuatan hubungan ini tidak cukup untuk dianggap relevan dalam metodologi penelitian khusus ini.

Jadi, pengeluaran pemerintah bukanlah pendorong utama perubahan utang luar negeri sepanjang periode penelitian. Oleh karena itu, model tersebut mungkin bukan faktor terpenting dalam menjelaskan evolusi utang luar negeri Indonesia.

5) Uji Koefisien Determinasi

Salah satu cara untuk mengevaluasi sejauh mana variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi adalah dengan melihat koefisien determinasi. Nilai R^2 dapat berkisar antara nol hingga satu. Se jauh mana suatu model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen berbanding lurus dengan nilai R^2 -nya. Tetapi jika R^2 rendah, itu berarti variabel yang tidak terkait dengan model tersebut memengaruhi variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,357 ^a	,128	,061	4,18412

a. Predictors: (Constant), Belanja Pemerintah

b. Dependent Variable: Utang Luar Negeri

Sumber : Data diolah, SPSS

Tabel Ringkasan Model menunjukkan bahwa nilai R-squared adalah 0,128, yang setara dengan 12,8%. Kebijakan fiskal, yang diukur dengan pengeluaran pemerintah, hanya dapat menjelaskan 12,8% dari varians utang luar negeri, menurut hasil ini.

Pada saat yang sama, variabel yang tidak termasuk dalam model penelitian menjelaskan sisa 87,2%. Akibatnya, daya penjas model mengenai hubungan antara pengeluaran publik dan utang luar negeri tetap terbatas. Daya penjas faktor independen pada variabel dependen semakin berkurang menjadi 6,1% setelah memperhitungkan jumlah variabel dalam model, seperti yang ditunjukkan oleh nilai Adjusted R-square sebesar 0,061. Hal ini memberikan bukti

lebih lanjut bahwa model regresi yang digunakan tidak ideal untuk memahami fluktuasi utang luar negeri

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peneliti di Indonesia menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah (sebagai proksi kebijakan fiskal) dan utang luar negeri Indonesia selama periode 2010 hingga 2024, dan menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan hal tersebut, dengan nilai signifikansi sebesar 0,191 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05.

Selain itu, model regresi secara keseluruhan juga tidak signifikan berdasarkan hasil uji simultan (uji F), dengan nilai signifikansi yang sama yaitu 0,191. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian yang digunakan belum mampu menjelaskan variasi utang luar negeri secara memadai melalui variabel pengeluaran pemerintah. Variabel kebijakan fiskal hanya mampu menjelaskan sebesar 12,8% variasi utang luar negeri ($R^2 = 0,128$), sementara sisanya sebesar 87,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti kebijakan moneter, kondisi makroekonomi, serta faktor eksternal global, memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap utang luar negeri.

Di sisi lain, arah hubungan antara pengeluaran pemerintah dan utang luar negeri ditunjukkan oleh koefisien regresi yang bernilai positif. Namun demikian, kekuatan hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik.

Oleh karena itu, hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sebagai representasi kebijakan fiskal bukan merupakan determinan utama utang luar negeri Indonesia. Dengan demikian, pengembangan model penelitian dengan memasukkan variabel-variabel lain sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Bado, B., Jailan, W., & Alam, S. (2024). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak, Inflasi, dan Defisit Anggaran Terhadap Utang Luar Negeri Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 997–1010. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1315> manajemen
- Citaningati, P. R., & Kamaluddin. (2022). An Alternative for the External Debt with the Implementation of Islamic Financial Instrument: Study on Indonesia Deficit Budget

- Policy. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(3), 501–514.
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i3.7789>
- International Monetary Fund (IMF). (2022). *Fiscal policy and public debt management*. Washington, DC: IMF.
- Kusuma, E. P., Soebagiyo, D., & Hasmarini, M. I. (2025). Analisis Utang Pemerintah terhadap Kebijakan Fiskal di Indonesia 2014-2023. *Center of Economic Student Journal*, 8(1), 307–317. <https://doi.org/https://doi.org/10.56750/csej.v8i1.1073>
Analisis
- Kusumasari, D. (2020). External debt of Indonesia: From debt-led growth to growth-led debt? *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 21–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29259/jep.v18i1.10801> 21
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10.
- Triatmanto, B., Bawono, S., & Wahyuni, N. (2023). Research in Globalization The contribution and influence of total external debt, FDI, and HCI on economic growth in Indonesia, Thailand, Vietnam, and Philippines. *Research in Globalization*, 7, 1–9.
- Utama, M. M., & Chalid, P. (2024). Indonesia's External Debt Odyssey: Impact Of Fiscal And Political Changes From 1999 To 2023. *Journal of Developing Economies*, 9(2), 282–302. <https://doi.org/10.20473/jde.v9i2.53517>
- Zebua, A. N. B. (2026). Analisis Dilema Utang Luar Negeri Dan Kemandirian Fiskal: Strategi Pembiayaan Pembangunan Di Negara Berkembang Periode 2020-2025. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 03(01), 62–67.
- World Bank. (2023). *International debt statistics 2023*. Washington, DC: World Bank.